

JURNAL

PENELITIAN DOSEN PEMULA



ANALISIS PENGARUH TERWUJUDNYA *SMART SOCIETY* BAGI PENINGKATAN PELAYANAN BUPLIK DI KABUPATEN SITUBONDO

Oleh :

Ketua : Muhammad Iqbal Anshory, S.SI, M.Si **0724028801**

Anggota : Yudhistira Harisandi, S.T, M.Si **0706067504**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

AGUSTUS 2018

ANALISIS PENGARUH TERWUJUDNYA *SMART SOCIETY* BAGI PENINGKATAN PELAYANAN BUPLIK DI KABUPATEN SITUBONDO

Muhammad Iqbal Anshory, S.SI, M.Si

Yudhistira Harisandi, S.T, M.Si

RINGKASAN

Pendekatan “tradisional” yang selama ini digunakan sudah tidak memadai lagi untuk mengatasi permasalahan kota yang kompleks. Esensi pendekatan tradisional ialah memecahkan permasalahan secara “satu per satu” dan ini tidak menyelesaikan permasalahan sebab satu masalah barangkali selesai, masalah lainnya muncul, begitu seterusnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan “serentak” atau pendekatan “simultan” atau pendekatan “integral holistik/terintegrasi” untuk mengatasi persoalan kota yang semakin kompleks, menuju kota masa depan yang diimpikan oleh penduduknya, yang lebih dikenal dengan sebutan konsep *smart society* atau kota “cerdas” atau kota “impian masa depan”. Konsep *Smart Society* adalah sebuah pendekatan cerdas dalam membangun kota impian yang bersifat “integralistik atau terintegrasi” untuk mengatasi permasalahan kota yang bertambah kompleks seiring dengan jumlah penduduknya yang makin banyak, yang berbanding lurus dengan kebutuhan-kebutuhannya, ekonomi maupun non ekonomi. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi pengaruh positif dengan adanya teknologi baru dan pembangunan baru bagi masyarakat, dapat mempermudah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Kata Kunci: *Smart Society*, permasalahan masyarakat, pelayanan pemerintah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan terhadap konsep *smart society* tergantung dari adanya unsur, diantaranya yaitu ; (1). Kreatif, mengandung arti kemampuan menghasilkan karya yang berguna dan baru, baik pada tataran individu maupun organisasi (Schilling, 2013), (2). Inovatif, mengandung arti implementasi praktis dari sebuah ide menjadi sebuah alat atau proses baru yang bermanfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat (Schilling, 2013; Fontana, 2011). Kedua unsur tersebut harus terwujud dan terintegrasi kedalam sebuah sistem penataan kota. Implementasi konsep *smart society* akan

berjalan lebih efektif apabila pemerintahan kota/kabupaten dalam merancang kota/kauipaten impian masa depan menggunakan kerangka layanan berbasis IT.

Oleh karena itu kajian ini berusaha menjelaskan terhadap konsep *smart city* dalam konteks mewujudkan *smart society* secara intergratif terhadap masyarakat secara prima sebagai obyek pelayanan publik di Kabupaten Situbondo. Sehubungan dengan sedang berkembangnya konsep *Smart City*. Pemahaman terhadap konsep *Smart Society* akan menjadi sebuah terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah yang terkait dengan kepentingan publik di Kabupaten Situbondo yang pada akhirnya dapat meningkatkan performa partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat di kabupaten Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian ini secara spesifik sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran dan fungsi para pihak yang terkait untuk mewujudkan *Smart Society* di Kabupaten Situbondo ?
- b. Mengidentifikasi prospek dan potensi untuk menuju terwujudnya *smart society* sebagai bagian dari kota cerdas di Kabupaten Situbondo ?
- c. Bagaimana desain strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan keberlanjutan terwujudnya *smart society* sebagai bagian dari kota cerdas di Kabupaten Situbondo (bentuk kebijakan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam upaya mendukung keberhasilan terhadap Smart City di Kabupaten Situbondo Tahun 2018, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu :

- a. Menjelaskan peran dan fungsi para pihak yang terkait untuk mewujudkan smart society di Kabupaten Situbondo;
- b. Menjelaskan prospek dan potensi untuk menuju terwujudnya *smart society* sebagai bagian dari kota cerdas di Kabupaten Situbondo,
- c. Mendesain format strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan keberlanjutan terwujudnya *smart society* sebagai bagian dari kota cerdas di Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat keilmuan :

Pembangunan kota yang berkelanjutan merupakan salah satu paradigma baru dalam pengelolaan model pembangunan suatu daerah. Pembangunan kota yang berkelanjutan mempunyai empat syarat

utama, yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*. *Smart Governance* meliputi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, layanan publik, serta transparansi pemerintah. Untuk *Smart Economy*, meliputi kewirausahaan dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. *Smart Living* melingkupi fasilitas pendidikan, pariwisata, transportasi, serta infrastruktur lainnya yang berbasis TIK, sedangkan yang terakhir, *Smart Environment*, melingkupi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang berkelanjutan dengan basis IT.

- b. Manfaat kebijakan :

Secara jangka panjang, dapat mengotimalkan terwujudnya *Smart Governance* yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, layanan publik, serta transparansi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo.

BAB 2. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Sustainable Urban Development*

Pembangunan kota berkelanjutan didefinisikan sebagai pengembangan kota yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama. (*Conference Strategies for Sustainable Cities*, 1999). Secara spesifik, kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) diartikan sebagai kota yang direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung-jawab dalam penghematan sumber daya pangan, air, dan energi; mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan; dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan.

2.2 Teori *Smart Governance*

Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah salah satu bagian dari terwujudnya *Smart City*. Secara utuh *smart city* terdiri dari 6 dimensi pembentuk yaitu *smart governance, smart environment, smart living, smart people, smart mobility* dan *smart people* (Cohen, B., 2013).

2.3 Teori Pelayanan Publik

Menurut Edvardsson et al (2005) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

2.4 *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Menurut Sedarmayanti hal ini dikarenakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.

Good Governance telah menjadi wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di dunia yang tidak dapat dilepaskan dari tulisan David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya "*Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit*

the Public Sector" pada tahun 1992. Melalui bukunya tersebut, Osborne dan Gaebler mengajukan konsep yang berisi 10 (sepuluh) prinsip *Reinventing Government* sebagai konsep kewirausahaan yang bisa dijalankan oleh lembaga publik maupun lembaga-lembaga non profit lainnya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan penelitian ini melingkupi dua hal yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo. Sedangkan ruang lingkup kajian materi meliputi: peran dan fungsi para pihak yang terkait untuk mewujudkan *smart society* di Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk menuju keberlanjutan pembangunan sebuah kota.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait dan data peran dan fungsi para pihak yang terkait untuk mewujudkan *smart society*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data baku yang diperoleh pada Instansi atau Organisasi yang ada, baik pemerintah maupun swasta (Muslimin, 2002:23).

3.4 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan perkembangan *Smart Societi* yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yang diawali pada 22 Mei 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018.

3.5 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan permasalahan sehingga metode analisis data yang digunakan sebagai berikut :

No	Tujuan Penelitian	Metode	Sumber Data
1	Menjelaskan peran dan fungsi para pihak yang terkait untuk mewujudkan <i>smart society</i> di Kabupaten Situbondo	Analisis Stakeholders	1. Kuesioner 2. FGD
2	Menjelaskan prospek dan potensi untuk menuju terwujudnya <i>smart society</i> sebagai bagian dari kota cerdas di Kabupaten Situbondo	Analisis Prospektif	1. Kuesioner 2. FGD

Tabel 3.1 Metode analisis data

3.5.1 Analisis Para Pihak

Analisis ini dilakukan untuk mengelola potensi masalah yang diperkirakan akan menghambat peran dan fungsi lembaga pemerintahan kabupaten dalam mewujudkan pendekatan dengan *smart society* ini akan menjadikan Kabupaten Situbondo menjadi sebuah kawasan yang nyaman, aman, efisien dan berkelanjutan. Analisis partisipan/stakeholder dilakukan untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang perlu dipertimbangkan ketika akan mencari solusi terhadap ragam persoalan yang terkait dengan pendekatan *smart society* ini akan

menjadikan Kabupaten Situbondo menjadi sebuah kawasan yang nyaman, aman, efisien dan berkelanjutan. Analisis stakeholder meliputi tiga tahap yaitu :

a. Inventarisasi para pihak

Inventarisasi stakeholder dilakukan dengan metode wawancara secara terbuka dengan orang-orang atau pihak-pihak yang relevan dan memahami suatu masalah. Inventarisasi stakeholder dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif-kualitatif. Inventarisasi stakeholder akan memetakan peran dan kepentingan dari masing-masing stakholder sampel, kemudian dilihat sejauh mana keterlibatan dan kepedulian stakholders tersebut terhadap suatu masalah.

b. Analisis pengaruh dan kepentingan

Unsur terpenting pada analisis stakeholders adalah penilaian atas kepentingan (*interests*) serta tingkat pengaruhnya (*influence*) pada proses penyelesaian suatu. Analisis yang dipakai adalah analisis stakeholder PIL (P=Power, I=Interest dan L=legitimate) berdasarkan dari kriteria kekuatan, interest dan legitimate stakeholder.

c. Partisipasi

Partisipasi merupakan proses keterlibatan *stakeholders* dalam mempengaruhi dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu tiap *stakeholder* akan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda sesuai dengan bobot yang dimilikinya. Bobot yang dimaksud adalah tingkat kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) dari *stakeholder* terhadap suatu permasalahan dalam masyarakat.

3.5.2 Analisis Prospektif

Analisis prospektif ini digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan melihat apakah perubahan dibutuhkan pada masa depan (Treyer, 2003). Tahapan analisis prospektif dengan menggunakan metode FGD/lokakarya adalah (1). Menerangkan tujuan studi, (2). Identifikasi kriteria, (3). Analisis pengaruh antar faktor, (4). Membuat keadaan suatu faktor, (5). Membangun dan memilih scenario dan (6). Implikasi dari suatu skenario.

Nilai hubungan antar faktor ditetapkan sebagai berikut : untuk dua faktor yang tidak ada saling pengaruh dibarikan nilai nol, sedangkan bila ada pengaruh antar faktor diberi nilai satu sampai tiga, nilai makin tinggi menunjukkan pengaruh makin kuat. Penilaian antar faktor pada analisis prospektif dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Skor atau Nilai Pengaruh Antar Faktor pada Analisis Prospektif (Treyer,2003,Godet, 2000 dan GTZ, 2005)

Skor	Arti
0	Tidak ada pengaruh
1	Berpengaruh kecil
2	Berpengaruh sedang
3	Berpengaruh besar

Tahap selanjutnya adalah membuat keadaan atau state dari faktor kunci. Keadaan harus memiliki peluang sangat besar untuk terjadi. Selanjutnya, dari keadaan ini disusun

scenario yang mungkin terjadi dan kemudian dibahas implikasi dari skenario.

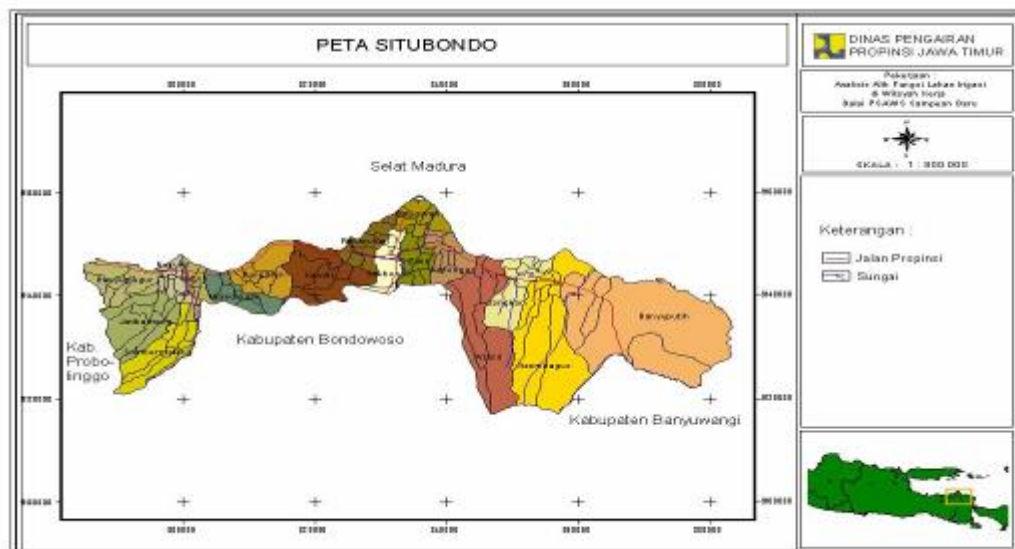
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan “Daerah Wisata Pantai Pasir Putih“ yang letaknya diujung timur Pulau Jawa, bagian Utara dengan posisi di antara 7°35’–7°44’ Lintang Selatan dan 113°30’–114°42’ Bujur Timur. Luas wilayah menurut kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih 48,167 km² disebabkan oleh karena luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan Wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 2.641 km².

Kabupaten Situbondo mempunyai batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali.



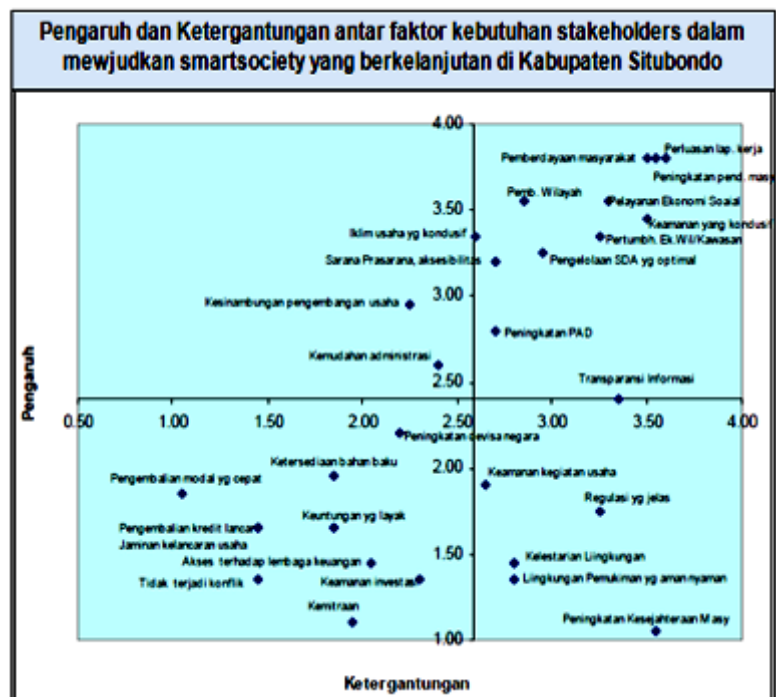
4.2 Hasil Analisis Peran Para Pihak Dalam *Smart society*

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian lapangan, *stakeholders* yang terkait dalam mewujudkan *smartsociety* di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang tinggalnya di wilayah Kabupaten Situbondo.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan jajarannya seperti dinas-dinas yang berkompeten dengan hadirnya pelayanan publik yang mendukung terwujudnya *smart society*.
- c. Lembaga legislatif, sebagai lembaga kontrol yang mewakili rakyat terhadap aktifitas dan produk-produk pemerintah kabupaten, sekaligus sebagai lembaga pembuat peraturan daerah.
- d. Pakar/ahli dibidang teknologi informasi, perencanaan daerah dan pembangunan di Wilayah Kabupaten Situbondo.
- e. Pelaku bisnis adalah pengusaha atau praktisi di lapangan yang bergerak dibidang kebutuhan masyarakat luas baik terkait dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan fakta lapangan maka faktor-faktor pemenuhan kebutuhan *stakeholder* yang harus diperhatikan dalam mendukung terwujudnya *smartsociety* secara berkelanjutan. Terdapat 25 faktor yang diidentifikasi yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi wilayah/kawasan, (2) peningkatan pelayanan publik masyarakat, (3) peningkatan pendapatan asli daerah, (4) pembangunan wilayah, (5) kemitraan, (6) keamanan yang kondusif, (7) peningkatan devisa negara, (8) pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, (9) perluasan lapangan kerja, (10) pengembalian modal yang cepat, (11) kemudahan administratif, (12) jaminan kelancaran usaha, (13) keamanan investasi, (14) regulasi yang jelas, (15) keuntungan

yang layak, (16) ketersediaan informasi pasar, (17) iklim usaha, (18) pelayanan ekonomi dan sosial, (19) informasi sarana dan prasarana wilayah, (20) lingkungan pemukiman yang nyaman, (21) tidak terjadi konflik, (22) akses terhadap lembaga publik, sosial pendidikan dan ekonomi, (23) transparansi informasi, (24) pemberdayaan masyarakat, dan (25) kesinambungan pengembangan usaha. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan faktor kunci mendukung terwujudnya *smart society* secara berkelanjutan di Kabupaten Situbondo berdasarkan formulasi permasalahan dan kebutuhan *stakeholder*.



Sumber : Data Primer, Diolah 2018

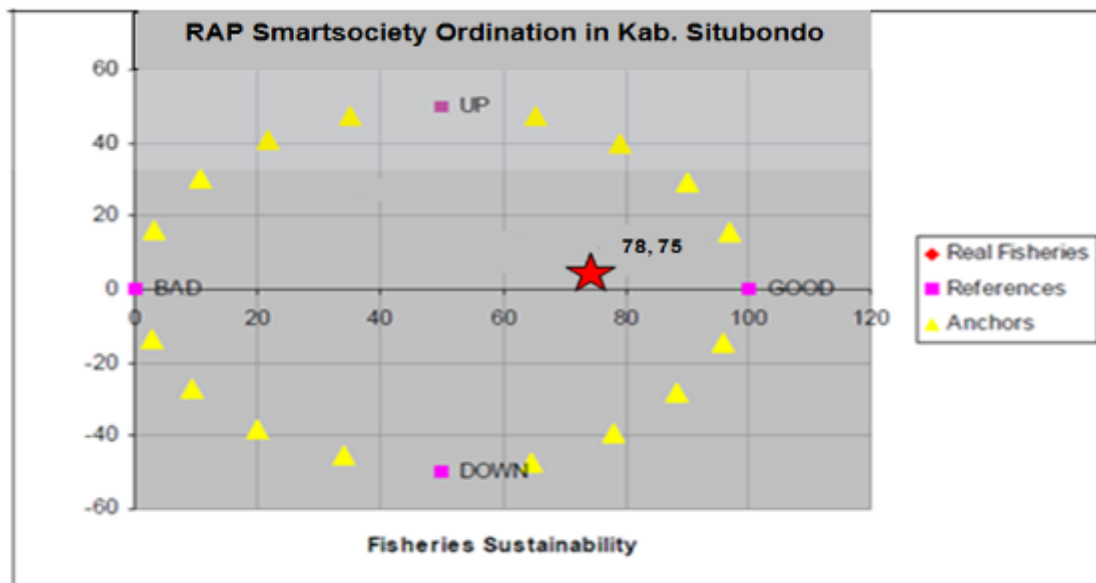
Hasil penggabungan pendapat kelompok *stakeholders* yang terlibat diperoleh aktor yang berkepentingan dalam mendukung terwujudnya *smart society* secara berkelanjutan di Kabupaten Situbondo adalah PEMDA sebagai instansi teknis yang sangat terkait dengan mendukung terwujudnya *smart society*, aktor berikutnya adalah LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan aktor yang terakhir adalah Masyarakat.

4.3 Hasil Analisis Propek Dan Potensi *Smart Society*

Visi setiap pemerintah daerah selain memiliki dimensi internal (cita-cita yang akan diwujudkan) akan selalu berkaitan dengan sejumlah aspek eksternal, terutama yang berkaitan dengan tuntutan pemenuhan berbagai aspek relasi antar anggota masyarakatnya. Adalah merupakan suatu fakta bahwa terdapat desakan dari perkembangan perseptif kebijakan publik yang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu : Partisipasi (*Participation*), Aturan hukum (*Rule of law*), Transparansi

(*Transparency*), Daya tangkap (*responsiveness*), Berkeadilan (*Equity*), Efektivitas dan efisien (*Efektiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Visi Strategi (*Strategi Vision*). (Leer, 1999).

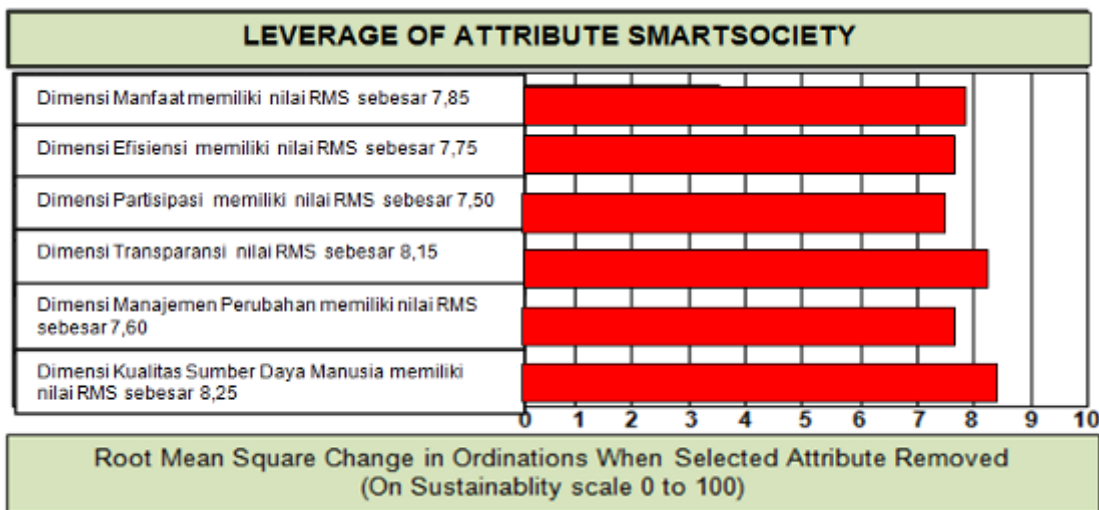
Berdasarkan hasil analisis MDS dengan *Rap-Fish for Smartsociety*, diketahui nilai potensi dan prospek mewujudkan *smart society* di Kabupaten Situbondo yaitu sebesar 78,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi dan prospek mewujudkan *smart society* di Kabupaten Situbondo berada pada status **cukup berpotensi dan berprospek**. Indeks potensi dan prospek mewujudkan *smart society* di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 4.3 RAP Smart Society Ordination in Kabupaten Situbondo

Selanjutnya setelah dilakukan analisis potensi dan prospek mewujudkan *smart society* di Kabupaten Situbondo dengan alat analisis *leverage factor*. Hasil analisis *Leverage* diperoleh dari enam atribut utama, diantaranya yaitu : (1) dimensi manfaat memiliki nilai RMS sebesar 7,85 (2). dimensi efisiensi memiliki nilai RMS sebesar 7,75 (3). dimensi partisipasi memiliki nilai RMS sebesar 7,50, (4). dimensi transparansi

memiliki nilai RMS sebesar 8,15, (5). Dimensi Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai RMS sebesar 8,25 dan (6). dimensi manajemen perubahan memiliki nilai RMS sebesar 7,60. Hasil dari analisis *leverage factor* potensi dan prospek mewujudkan *smart society* di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 4.4 Hasil analisis *Leverage Factor* pada potensi dan prospek mewujudkan smart society di Kabupaten Situbondo.

Analisis *Monte Carlo* yang dilakukan pada keenam dimensi menunjukkan menunjukkan hasil yang baik hal tersebut ditunjukkan dengan mengumpulnya titik hasil pengulangan MDS di antara nilai 75,6–80,20 atau titik ordinasi berada pada posisi yang saling berdekatan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Terwujudnya *Smart Society* Bagi Peningkatan Pelayanan Buplik Di Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan diantaranya, yaitu :

1. Hasil penggabungan pendapat kelompok *stakeholders* yang terlibat diperoleh aktor yang berkepentingan dalam mendukung terwujudnya *smart society* secara berkelanjutan di Kabupaten Situbondo adalah PEMDA sebagai instansi teknis yang sangat terkait dengan mendukung terwujudnya *smart society*, aktor berikutnya adalah LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan aktor yang terakhir adalah Masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi perhatian yang sangat besar.
2. Analisis potensi dan prospek mewujudkan smart society di Kabupaten Situbondo

dengan alat analisis *leverage factor*. Hasil analisis *Leverage* diperoleh dari enam atribut utama, diantaranya yaitu : (1) dimensi manfaat memiliki nilai RMS sebesar 7,85 (2). dimensi efisiensi memiliki nilai RMS sebesar 7,75 (3). dimensi partisipasi memiliki nilai RMS sebesar 7,50, (4). dimensi transparansi memiliki nilai RMS sebesar 8,15, (5). Dimensi Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai RMS sebesar 8,25 dan (6). dimensi manajemen perubahan memiliki nilai RMS sebesar 7,60. Analisis *Monte Carlo* yang dilakukan pada keenam dimensi menunjukkan menunjukkan hasil yang baik hal tersebut ditunjukkan dengan mengumpulnya titik hasil pengulangan MDS di antara nilai 75,6–80,20 atau titik ordinasi berada pada posisi yang saling berdekatan.

5.2 Saran-saran

Hasil Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk Analisis Pengaruh Terwujudnya *Smart Society* Bagi Peningkatan Pelayanan Buplik Di Kabupaten Situbondo, diantaranya sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya *political will* yang kongkret, yaitu dengan peningkatan aspek infrastruktur dan sistem manajemen pelayanan publik sudah mendukung konsep *smart society* dengan

fokus pengembangan pada Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kompetensi, knowledge, dan kepehaman terhadap teknologi informasi.

2. Merealisasikan instrumen yang dapat membangun dasar pengembangan *smart society* yang perlu dukungan ketersediaan infrastruktur ICT-nya seperti teknologi broadband fiber, ketersediaan internet kecepatan tinggi (WiFi), dan adanya data center untuk keperluan aplikasi layanan publik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Meningkatkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan kompetitif, inovatif, efisien, dan berbasis IT. Melalui pendekatan membangun strategi komunikasi yang efektif dengan para *stakeholders*.
4. Meningkatkan berbagai program pelatihan dan pendampingan terhadap pengembangan masyarakat */civil society* sehingga menjadi masyarakat yang pintar dan inovatif, kreatif, produktif, serta mampu memanfaatkan potensi keragaman sosial-budaya untuk membangun daya saing Kota Situbondo.
5. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas akses terhadap layanan online Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo di seluruh kawasan yang tidak dapat dipungkiri, adanya masalah kesenjangan digital yang tidak semua masyarakat dapat mengakses karena keterbatasan akses internet. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Situbondo dapat mengambil inisiatif dengan mendirikan berbagai kios informasi layanan pemerintah di berbagai tempat umum dan *counter-counter* bagi orang yang tidak punya akses internet khususnya di kawasan perdesaan dan hutan sehingga diharapkan kesenjangan digital ini secara perlahan bisa dikurangi.
6. Meningkatkan fasilitasi layanan yang bisa dilakukan antar badan pemerintah di lingkungan Kabupaten Situbondo. Hal ini

disebabkan karena banyak sekali layanan yang berhubungan antara satu badan pemerintah dengan badan lain. Layanan informasi kependudukan misalnya, akan berhubungan dengan layanan pajak, kepolisian, dan semua layanan yang membutuhkan data dan informasi pribadi seseorang. Untuk bisa menjadikan aplikasi dan layanan yang saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lain, dibutuhkan berbagai aplikasi yang punya standar *interoperabilitas* yang sama. Dibutuhkan tidak hanya kerjasama operasional antar badan pemerintah, tetapi juga aplikasi dan teknologi yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoulleev, A. (2011). *A Smart World: A Development Model For Intelligent Cities. The 11th Ieee International Conference On Computer And Information Technology (Cit-2011)*. [Http://www.Cs.Ucy.Ac.Cy/Cit2011/.Pdf](http://www.cs.ucy.ac.cy/cit2011/)
- Batty, M. (2013). *Big Data, Smart Cities And City Planning. Dialogues In Human Geography*, 3, 274-279. [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/2043820613513390](http://dx.doi.org/10.1177/2043820613513390)
- Briggs, J. (2005). *The Use Of Indigenous Knowledge In Development: Problems And Challenges*. *Progress In Development Studies*, 5, 99-114. [Http://Dx.Doi.Org/10.1191/1464993405ps105a](http://dx.doi.org/10.1191/1464993405ps105a)
- Bagir Manan, *Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, 2004*
- Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002
- Dewi, A. (2007). *Community-Based Analysis Of Coping With Urban Flooding: A Case*

- Study In Semarang, Indonesia. Master Of Science, Itc.*
- Dadang Solihin, Pengukuran Good Governance Index. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik – BAPPENAS, 2007
- ESCAP. (2008). *Building Community Resilience To Natural Disasters Through Partnership: Sharing Experience And Expertise In The Region. New York: United Nations.*
- Folke, C. (2006). *Resilience: The Emergence Of A Perspective For Social–Ecological Systems Analyses. Global Environmental Change, 16,253-267.*
[Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Gloenvcha.2006.04.002](http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002)
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005
- Harsono, HTN, Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Hardijanto, “Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance”,Makalah TOT Pengadaan Barang atau Jasa, Kementrian PAN, Jakarta , 2000
- Hendrikus Triwibawanto Dedeona “Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif”, Jurnal Ilmu Adminitrasi, STIA LAN , Bandung, Vol.4 No 1 Maret 2007
- Joko Widodo, *Good Governance* (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan Cendekia, Surabaya, 2001
- Lalolo Krina P, “indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi”
[Http// good governance : Bappenas.go.id/informasi.Htm](http://goodgovernance.bappenas.go.id/informasi.Htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004
- Meuthia Ganie Rahman, “*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000
- Musacchio, L. W. J. (2002). *Cities Of Resilience: Four Themes Of The Symposium (Abstracts). Symposium #19: Cities Of Resilience: Integrating Ecology Into Urban Planning, Design, Policy, And Management. Washington, Dc: Ecological Society Of America.*
- Nam, T. P., Theresa A. (2011) *Smart City As Urban Innovation: Focusing On Management, Policy, And Context (Icegov2011). 5th International Conference On Theory And Practice Of Electronic Governance 2011 New York. 185-194.*
[Http://Dx.Doi.Org/10.1145/2072069.2072100](http://dx.doi.org/10.1145/2072069.2072100)
- Pelling, M. (2003). *The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience, Earthscan.*
- Priyatmoko, “Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Impelementasi Otonomi daerah “ dalam Syamsudin Haris (ed) Desentralisasi dan Otonomi daerah , LIPI Press, Jakarta, 2005
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah,, Mandar Maju, Bandung, 2003*
- SH. Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002*
- Sari, A. D., Yoppy. (2010). *City Resilience Strategy: Semarang's Adaptation Plan In*

Responding To Climate Change.
Semarang: Tahta Undip.

Sariffuddin, S., Susanti, R. (2011). Penilaian Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mendukung Permukiman Berkelanjutan Di Kelurahan Terboyo Wetan, Semarang. Makara Seri Sosial Humaniora, 15, 29 - 42. [Http://Dx.Doi.Org/10.7454/Mssh.V15i1.892](http://dx.doi.org/10.7454/Mssh.V15i1.892)

Shaw, R., Srinivas, H., Sharma, A. (2009). *Urban Risk Reduction: An Perspective.* United Kingdom: Emerald.

Tomordy, M. (2010). *Smart Cities Transforming The 21st Century City Via The Creative Use Of Technology,* London, Hong Kong, San Francisco, Sydney, Arup.

UNISDR. (2009). *Terminology On Disaster Risk Reduction.* Geneva: United Nations International Strategy For Disaster Reduction (Unisdr).

Vicini, S. B. S., Sanna, A. (2012). *The City Of The Future Living Lab.* International Journal Of Automation And Smart Technology, 2, 201-208. [Http://Dx.Doi.Org/10.5875/Ausmt.V2i3.134](http://dx.doi.org/10.5875/Ausmt.V2i3.134)

Yuen, B., Kumssa, A. (2011). *Climate Change And Sustainable Urban Development In Africa And Asia.* New York: Springer.